

IMPLEMENTASI PROGRAM *OFFICE WATER AND SANITATION AUSTRALIAN AID* DI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014-2016

Jordy Christy Virya¹
Nim. 1102045091

Abstract

The public need for clean water in Balikpapan is still not distributed evenly to the entire community due to the limited infrastructure of clean water pipeline network, especially in North Balikpapan. This prompted the Balikpapan City Government to contribute more to improving infrastructure development through the partnership of Indonesia Australia to implement the Australian Aid Office Water and Sanitation Program in Kota Balikpapan to assist PDAM Tirta Manggar in building infrastructure to meet the needs of the people of Balikpapan who are still difficult to obtain facilities clean water maximally.

Keywords: *Water, Australian Aid, Office Water and Sanitation, Balikpapan.*

Pendahuluan

Air bersih merupakan komponen penting bagi keberlangsungan hidup manusia, ekosistem alam dan pembangunan ekonomi. Sebuah studi tentang ketersediaan air bersih dunia menyebutkan bahwa terjadi peningkatan masalah air bersih secara global. Setiap harinya sekitar dua juta ton sampah mencemari wilayah perairan dan produksi limbah cair mencapai 1500 m³ yang mengakibatkan rata-rata daerah perkotaan mengalami kelangkaan air bersih. Kondisi ini diperburuk dengan pesatnya pembangunan di daerah tangkapan air. (*The United Nations Development Report*, www.unesco.org) Pada tahun 2000 Indonesia mengalami defisit air hingga 52.809 juta m³ dan untuk tahun 2015 diperkirakan defisitnya akan meningkat menjadi 134.102 juta m³. (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air: *Data Daerah Aliran Sungai*, sda.pu.go.id) Dari total potensi air baku di Indonesia sebesar 3,9 triliun m³, baru sekitar 14 miliar m³ atau sekitar 57 m³/kapita air baku yang dapat dikelola melalui reservoir. Kebutuhan air terbesar adalah di pulau Jawa yang mencapai 57 % dari seluruh penduduk Indonesia. (Humas PAM Balikpapan, *Kebutuhan Air Semakin Meningkat*, www.pambpp.co.id)

Kelangkaan air bersih dan banjir tiap tahunnya mengalami peningkatan, ditambah kerusakan hutan yang secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS), adalah cerminan permasalahan sumber daya air yang

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: odychristian@gmail.com

terjadi di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di Balikpapan bagian utara. Kota Balikpapan memiliki beberapa sumber daya air yang cukup potensial, terdapat 32 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari sungai-sungai besar dan kecil. Beberapa sungai-sungai besar yang cukup potensial sebagai cadangan sumber air baku Kota Balikpapan. Yaitu, sungai Manggar Besar, Sungai Teritip dan Sungai Wain. Di hulu sungai Manggar Besar terdapat waduk manggar merupakan infrastruktur penyokong utama sumber air baku di kota Balikpapan. Balikpapan adalah salah satu tipe perkotaan di Kalimantan Timur yang dalam dekade terakhir ini mengalami kemajuan yang pesat, sehingga meningkatkan kebutuhan air bersih pemukiman dan air baku industri. Pengadaan air bersih di Kota Balikpapan dalam skala yang besar dikelola oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Manggar.

Upaya lain yang juga telah dilakukan Pemerintah Balikpapan dalam menangani krisis air bersih adalah dengan Desalinasi. Desalinasi adalah proses pemurnian atau pengurangan garam terlarut didalam air laut yang lebih besar dari 1000 ppm hingga 40.000 ppm menjadi air. Sistem Desalinasi yang pertama kali adalah *Multistage Flash* (MSF) dan *Reverse Osmosis* (RO) dengan membran yang kestabilannya rendah dimana biaya kapitalnya masih tergolong tinggi. Sistem yang menjanjikan dan menyajikan harga produk air yang rendah adalah RO dengan membran dan sistem hibrida seperti *MultiEffect Distillation* (MED) yang dikombinasi dengan kompresi uap ($VC=Vapor\ Compression$). Tetapi banyak pertimbangan dari para ahli untuk menerapkan Sistem Desalinasi karena sistem Desalinasi membutuhkan biaya yang cukup besar dan belum dikaji secara jauh oleh Pemerintah Daerah Balikpapan

Kurangnya infrastruktur sebagai penyokong pendistribusian air bersih kepada masyarakat Balikpapan menjadi kendala utama bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan Balikpapan Utara, infrastruktur saluran pipa yang masih minim menyebabkan sulitnya untuk menyalurkan air bersih kepada warga di kawasan Balikpapan Utara. PDAM Balikpapan selaku perusahaan penyedia/penyuplai air bersih bagi kota Balikpapan sampai saat ini terus berupaya guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Balikpapan agar masyarakat Balikpapan tidak lagi sulit untuk mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adanya Program *Office Water and Sanitation Australian Aid* merupakan suatu Program dari Australia yang ditujukan bagi kota-kota di Negara berkembang yang masih mengalami kesulitan di bidang infrastruktur sanitasi. Melalui program *Office Water and Sanitation Australian Aid* ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah setempat agar dapat mendistribusikan air bersih secara maksimal.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Bantuan Luar Negeri

Secara umum bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah lain yang dapat berbentuk barang atau dana. Bantuan luar negeri atau bantuan pembangunan merupakan salah satu instrumen ekonomi yang umum digunakan oleh negara-negara maju untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, terutama sejak akhir Perang Dunia II. Bantuan sebagian besar terdiri dari transfer uang, barang atau jasa dari satu negara ke negara lain. Bantuan militer dan bantuan pangan adalah salah satu bentuk awal dari bantuan luar negeri. Di

dekade terakhir proyek bantuan dengan tujuan meningkatkan infrastruktur di negara penerima telah menjadi semakin umum.

Dalam membahas bantuan luar negeri, pengertian bantuan luar negeri diartikan oleh sejumlah pakar. Dalam arti sempit, bantuan luar negeri diartikan oleh Robert Gilpin dalam bukunya *“The Political Economy of International Relations”* yakni bantuan luar negeri diartikan sebagai sejumlah dana yang diberikan oleh negara yang relatif maju atau kaya kepada negara yang secara ekonomi lebih miskin. Sedangkan dalam arti luas, K.J. Holsti dalam bukunya *“International Politics: Framework of Analysis”* mengartikan bantuan luar negeri sebagai transfer uang, teknologi, ataupun nasihat-nasihat teknis dari negara donor ke negara penerima.

Bantuan luar negeri (*foreign aid*) didefinisikan sebagai semua jenis bantuan yang diberikan oleh negara atau lembaga donor internasional, baik berupa pinjaman atau hibah dengan persyaratan tertentu. Bantuan ini tidak hanya terbatas dalam bentuk material kebendaan saja, namun juga bisa disalurkan dalam bentuk jasa. Bantuan luar negeri tersebut digolongkan ke dalam tiga jenis bantuan, yaitu:

1. Bantuan Program (*Program Aid*)

Bantuan Program (*Program Aid*) adalah bantuan berupa devisa yang diperlukan untuk menutup kekosongan neraca pembayaran, yang digunakan untuk mengimpor barang-barang yang diperlukan masyarakat, seperti bantuan pangan dan komoditas.

2. Bantuan Proyek (*Project Aid*)

Project Aid adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintahan berupa valuta asing yang ditukarkan ke dalam mata uang negara penerima dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan proyek-proyek pembangunan baik dalam rangka rehabilitasi, pengadaan barang atau peralatan dan jasa, serta perluasan atau pengembangan proyek-proyek pembangunan baru.

3. Bantuan Teknik (*Technical Assistance*)

Bantuan yang diberikan adalah berupa tenaga ahli, pelatihan, dan peralatan. Inti daripada bantuan teknik ini adalah dimungkinkannya ahli teknologi, yakni dengan mengisi kekosongan dalam bidang-bidang keahlian tertentu dan sekaligus memindahkan keahlian para tenaga ahli internasional kepada tenaga kerja di dalam negeri.

Negara pendonor maupun negara yang mendapatkan bantuan pada dasarnya mendapatkan keuntungan dari serah terima bantuan yang dilaksanakan. Bantuan luar negeri memiliki azas timbal balik, di mana secara historis sulit untuk ditemukan fakta bahwa bantuan yang diberikan hanya berdasarkan kebaikan negara pendonor semata. Alasan pemberian bantuan oleh suatu negara atau institusi tertentu terutama ialah selfinterest politik, strategi dan ekonomi, sekalipun pada umumnya alasan itu berupa moral atau kemanusiaan. Jadi sulit ditemukan adanya bantuan yang diberikan tanpa dilandasi oleh kepentingan.

Dalam konteks penelitian ini, jenis bantuan yang dimaksud adalah bantuan proyek (*Technical Assistance*) berupa hibah pembangunan infrastruktur. Pembangunan

infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas kapital fisik dan termasuk juga kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi masyarakat. Menurut Familoni, pembangunan infrastruktur dibedakan menjadi 2 yaitu; infrastuktur ekonomi dan sosial. Infrastruktur ekonomi diantaranya sarana publik seperti tenaga listrik, telekomunikasi, suplai air bersih, sanitasi dan saluran pembuangan dan gas. Kemudian juga termasuk pula pekerjaan umum, seperti jalan, kanal, bendungan, irigasi dan drainase serta proyek transportasi seperti jalur kereta api, angkutan kota, waterway, dan bandara. Sedangkan infrastruktur sosial mengacu kepada fasilitas dan mekanisme yang menjamin pendidikan, kesehatan, pengembangan masyarakat, distribusi pendapatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial.

Keamanan Air (Water Security)

Water security didefinisikan sebagai kesempatan yang didapat populasi untuk mengamankan akses berkelanjutan dari air yang berkualitas dalam jumlah yang memadai untuk mempertahankan hidup, kesejahteraan manusia dan pembangunan sosial ekonomi, untuk memperkuat perlindungan atas polusi air dan permasalahan yang berkaitan dengan air, dan untuk melestarikan ekosistem dalam iklim yang damai agar tercapai stabilitas politik. *Water security* merangkum tantangan kompleks yang saling berhubungan dan fokus pada permasalahan air untuk menciptakan pengertian yang lebih luas dari keamanan, kelestarian, pembangunan dan kesejahteraan manusia. Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi bagi *water security*, mulai dari biofisik untuk infrastruktur, kelambagaan, politik dan keuangan sosial. Dalam menangani permasalahan air diperlukan kolaborasi interdisipliner di seluruh sektor, masyarakat maupun pemerintah (pembuat kebijakan). (*Water Security*, www.unwater.org) Pencegahan bencana *water security* yang ada di kota Balikpapan berada dalam tanggung jawab walikota beserta instansi terkait. Dalam rangka menangani krisis air di kota Balikpapan, pemkot Balikpapan mendapatkan bantuan hibah luar negeri dari Program Office Water and Sanitation Asutralian Aid sebagai sumber anggarannya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai jenis penelitian deskriptif yang fokus pada pencarian fakta dengan interpretasi sebaik mungkin. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan secara menyeluruh Implementasi Program *Office Water and Sanitation Australian Aid*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder yang disusun secara sistematis. Data sekunder yang digunakan merupakan sekumpulan data yang berasal dari hasil interpretasi data primer antara lain buku, akses media elektronik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau *library research*. Berdasarkan teknik penelitian yang digunakan ini penulis meneliti bahan pustaka, data dan literatur yang relevan, seperti buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, laporan, dokumen, *ebook*, serta berbagai publikasi lainnya yang menyediakan informasi yang sesuai untuk penelitian ini. Untuk analisa data penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu teknik menganalisa yang digunakan untuk menafsirkan dan menggambarkan persoalan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dianalisis. Teknik khusus yang digunakan adalah metode ilustratif, di mana penulis berupaya untuk mengaplikasikan teori pada situasi kongkrit, khususnya mengenai Implementasi Program *Office Water and Saniation Australian Aid* di Kota Balikpapan.

Hasil Penelitian

Implementasi Program *Office Water and Sanitation Australian Aid* pertama kali di terapkan di negara Afrika Selatan pada tahun 2001 dimana pemerintah Australia memberikan dana bantuan atau hibah sekitar \$800.000 atau sekitar 10 milyar untuk membantu menyelesaikan pembangunan infrastruktur sanitasi di kawasan-kawasan yang mengalami krisis air bersih. Program *Office Water and Sanitation* kedepannya diharapkan dapat menjangkau kawasan-kawasan yang terpelosok dan jauh dari perkotaan, Julie Bishop mengatakan “Dampak dari kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang aman mungkin paling besar pada perempuan dan anak perempuan. Air bersih dan sanitasi yang aman mendukung hampir semua hal lain yang kami coba capai. Berinvestasi dalam program sanitasi dan kebersihan berbasis masyarakat adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kesehatan, harga diri, prospek pendidikan untuk anak perempuan dan wanita”. Program *Office Water and Sanitation Australian Aid* merupakan program yang sangat didukung oleh banyak organisasi didunia salah satunya adalah *United Nation* (Perserikatan Bangsa-Bangsa). PBB meyakini bahwa Prgoram yang dilaksanakan oleh Pemerintah Australia ini dapat membantu negara-negara berkembang dalam membangun daerah/kawasan yang tertinggal jauh dari perkotaan.

Program *Office Water And Sanitation Australian Aid* masuk ke Indonesia sudah sejak tahun 2004, pada saat itu Kota Aceh menjadi tujuan dari program ini karena kondisi Aceh yang porak poranda akibat dari bencana alam Tsunami. Pemerintah Australia memberikan bantuan berupa dana Hibah sebesar 10 milyar guna membangun kembali infrastruktur Sanitasi di kota Aceh serta memberikan bantuan tenaga ahli dalam perencanaan pembangunan infrastruktur sanitasi, mulai 1 Mei 2006, program bantuan bilateral Australia di Indonesia akan dipromosikan dengan nama Kemitraan Australia Indonesia (AIP): program bantuan Pemerintah Australia secara keseluruhan dengan anggaran pengeluaran sekitar A\$2 milyar untuk jangka waktu lima tahun. Program ini mencakup paket Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (AIPRD) bernilai A\$1 milyar, satu-satunya paket bantuan terbesar dalam sejarah Australia. Bantuan Australia untuk Indonesia dilaksanakan oleh sejumlah lembaga Pemerintah Australia bermitrakan Pemerintah Indonesia. Logo Kemitraan Australia Indonesia (AIP) mencerminkan sangat pentingnya kemitraan atau dengan kata lain menunjukkan keterlibatan pejabat tinggi dari kedua Pemerintah dalam program. Didalam penerapannya Program *Office Water and Sanitation Australian Aid* terdiri dari 3 jenis bantuan yaitu: Bantuan berupa ide/gagasan perencanaan pembangunan Infrastruktur dibidang sanitasi seperti Pemberian ilmu/metode pengembangan dan perencanaan dalam membangun infrastruktur yang meliputi bidang Sanitasi dan Penataan tata kelola infrastruktur secara modern, Bantuan berupa Tenaga Ahli dalam pembangunan infrastruktur sanitasi dan Memberikan dana bantuan atau dana hibah dimana dana hibah tersebut dapat dikelola dengan instansi terkait / pemerintah Negara yang bersangkutan.

Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target akses universal 100-0-100, termasuk meningkatkan akses untuk layanan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah. Ini sebuah mekanisme transfer keuangan yang lebih baik untuk pendanaan air minum dan sanitasi, dan penyelarasan yang lebih baik antara peran kementerian dan tanggung jawab dengan kebijakan

desentralisasi Pemerintah Indonesia. Ditingkat pemerintah daerah, program ini mendukung diberlakukannya tarif pemenuhan biaya, komitmen Pemda yang lebih besar untuk menerapkan APBD bagi infrastruktur dan layanan air minum dan sanitasi, dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Pada fase ke-2 I, Australia telah mengelola dana sebesar A\$80 juta untuk hibah Air Minum yang diperuntukkan hingga 129 pemerintah daerah. Selain itu, Australia telah melaksanakan program Hibah Air Minum USAID sebesar USD 10 juta rupiah bagi 23 pemerintah daerah. Program ini mencakup survei baseline yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan. Program (yang didanai Pemerintah Australia, APBN dan USAID) tersebut telah memberikan manfaat bagi 400.000 rumah tangga di Indonesia. Program Hibah Air Minum dan Sanitasi telah memberikan hasil dengan semakin meluasnya penggunaan air minum perpipaan, dan meningkatnya penghematan rumah tangga.

Implementasi Dana Hibah Program *Office Water and Sanitation Australian Aid* Sampai dengan saat ini, kabupaten/kota yang sudah mengalokasikan dana untuk pembangunan sarana bidang penyehatan lingkungan permukiman relatif sedikit. Disamping itu anggaran yang dialokasikan di masing-masing kabupaten/kota untuk kegiatan bidang tersebut masih relatif rendah. Sementara itu kebutuhan masyarakat atas sarana tersebut sudah semakin mendesak. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus penyakit yang terjadi akibat tidak sehatnya lingkungan permukiman, akibat dari buruknya sistem pengelolaan air limbah dan persampahan. Pemerintah pusat mempunyai komitmen untuk mendorong pemerintah daerah dalam pembangunan bidang penyehatan lingkungan permukiman yang lebih tinggi di tahun 2010–2014, hal ini tercermin dari meningkatnya alokasi dana yang dianggarkan sebesar hampir tujuh kali dari anggaran yang dialokasikan lima tahun sebelumnya.

Pemerintah kabupaten/kota telah mulai memberikan perhatiannya kepada bidang penyehatan lingkungan permukiman, dengan telah dialokasikannya anggaran yang lebih besar untuk beberapa kegiatan terkait sektor air limbah dan persampahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan juga dengan mulai disusunnya dokumen perencanaan bidang sanitasi antara lain dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan/atau dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU Cipta Karya. Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan sarana bidang penyehatan lingkungan permukiman adalah melalui Program Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan Sanitasi/Program Australia-Indonesia *Infrastructure Grants for Sanitation* (sAIIG). Melalui program ini Pemerintah memberikan dana hibah untuk kabupaten/kota yang telah melaksanakan kegiatan sektor tersebut dengan menggunakan dana APBD pada tahun anggaran berjalan.

Pelaksanaan Program Hibah ini akan menggunakan mekanisme penerusan hibah sebagaimana diatur dalam PMK 168/2008 tentang Hibah Daerah dan PMK 169/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah, atau Peraturan Perundangan-undangan terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah. Hibah ini akan diberikan berdasarkan kinerja yang terukur (*output based*) atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada TA 2012, 2013, dan 2014, yang kemudian akan dilakukan verifikasi oleh Ditjen Cipta Karya.

Apabila hasil verifikasi menunjukkan hasil yang sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan, dana hibah akan dibayarkan sesuai dengan nilai yang telah disepakati. Pedoman ini berisi penjelasan mengenai petunjuk pelaksanaan Program Hibah bagi kabupaten/kota yang mengikuti program tersebut. Program ini ditujukan untuk mempercepat pencapaian pembangunan bidang air limbah dan persampahan. Sasaran program ini adalah kabupaten/kota yang telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan bidang PLP (air limbah dan persampahan) berupa dokumen SSK dan RPIJM Bidang PU Cipta Karya. Lingkup kegiatan program ini adalah penerusan hibah dari Pemerintah Australia melalui Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan sektor air limbah dan persampahan sesuai dengan syarat dan ketentuan teknis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya serta persyaratan lainnya terkait penyaluran dana hibah sesuai ketentuan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Dalam penerapannya Program Australia untuk pembangunan Sanitasi di Indonesia ini memiliki kriteria yang harus dipenuhi bagi daerah-daerah yang ingin mendapatkan dana hibah dalam hal ini adalah Balikpapan.

Kriteria Pemerintah Daerah Penerima Hibah (Provinsi/Kabupaten/Kota) adalah Memiliki dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan RPIJM Bidang PU Cipta Karya yang disetujui oleh Kepala Daerah masing-masing dan masih berlaku hingga TA 2014, Memiliki rencana komprehensif untuk kegiatan fisik pembangunan air limbah dan/atau persampahan Tahun Anggaran 2012 – 2014, Mempunyai dokumen anggaran (DPA) yang dilengkapi dengan dokumen perencanaan untuk kegiatan air limbah dan/atau persampahan pada Tahun Anggaran berjalan sampai dengan berakhirnya program hibah, Bersedia mengalokasikan anggaran untuk kegiatan air limbah dan persampahan untuk TA 2012-2014 yang mencakup pembangunan prasarana fisik yang ditunjukkan dalam bentuk surat komitmen kepala daerah yang dirinci dalam program tahunan, Pemda bersedia untuk memperluas cakupan pelayanan dan meningkatkan kinerja sektor air limbah dan persampahan, Pemda telah menyediakan lahan untuk pembangunan prasarana air limbah dan/atau persampahan yang akan dibangun, Pemda menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemda bersedia membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah dan persampahan yang dibangun yang ditunjukkan dengan surat pernyataan dari kepala daerah (terlampir), Pemda bersedia menyusun dan/atau memperbaiki peraturan perundangan terkait sektor air limbah dan persampahan, Pemda bersedia melakukan kegiatan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat termasuk kelompok perempuan terkait kesetaraan gender untuk sektor air limbah dan persampahan (penjelasan tentang kesetaraan gender terlampir), Sudah dan akan mempunyai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan air limbah dan persampahan yang sesuai dengan ketentuan perangkat peraturan yang ada.

Dalam mengimplementasi konsep Bantuan luar negeri dana hibah yang diterima oleh Pemerintah pusat yang di salurkan kepada pemerintah daerah sudah melalui mekanisme yang diatur oleh ketentuan-ketentuan di Perjanjian Penerusan Hibah (PPH). Bantuan berupa dana hibah dan tenaga ahli dibidang infrastruktur sanitasi untuk merancang kegiatan pembangunan yang berkelanjutan agar PDAM Tirta Manggar kota Balikpapan dapat memenuhi kebutuhan air bersih tidak hanya di

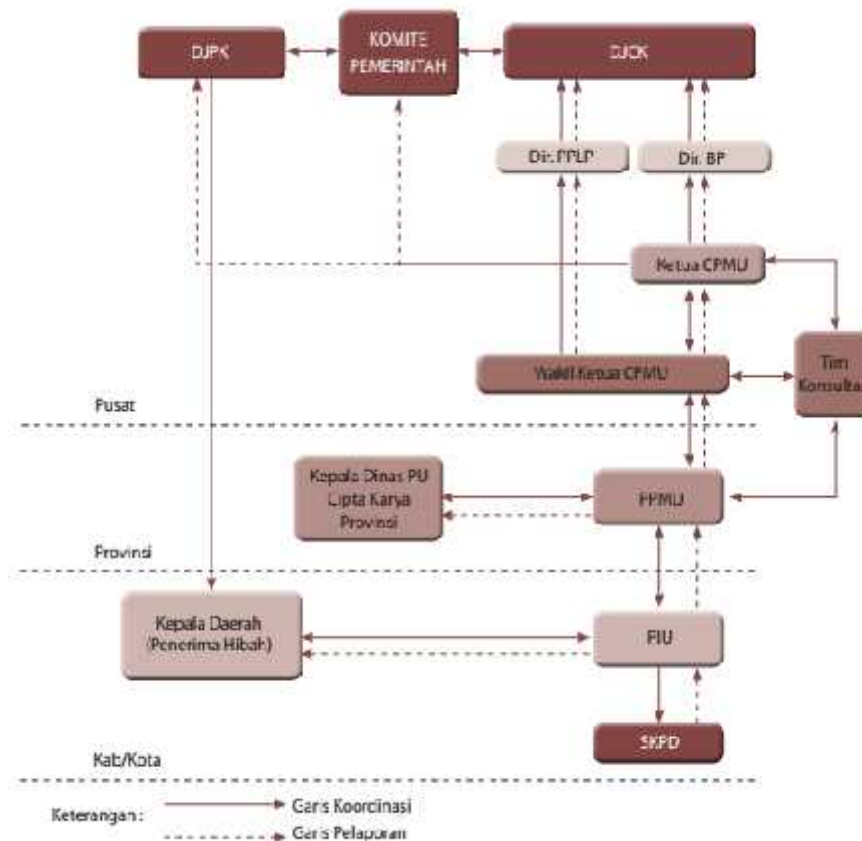
kawasan Balikpapan Utara tetapi menjangkau ke berbagai kawasan di Balikpapan yang masih sulit untuk mendapatkan fasilitas infrastruktur sanitasi.

Program/kegiatan yang dinilai layak untuk menentukan besaran dana hibah Program Hibah tersebut adalah kegiatan bidang air limbah dan/atau persampahan yang didanai melalui APBD (PAD, DAU dan DBH). Jenis Kegiatan yang dapat digantikan oleh dana hibah: Sektor air limbah dan Sektor persampahan. Bantuan teknis akan diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang didukung oleh Australia kepada Pemerintah Daerah peserta Program Hibah. Penjelasan mengenai jenis bantuan teknis dan teknis pelaksanaan adalah Kegiatan appraisal pelaksanaan program, kegiatan baseline survey, verifikasi pelaksanaan kegiatan dan untuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap daerah dalam bentuk pendampingan tenaga ahli.

Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi ini akan dikelola secara berjenjang dari tingkat Pusat, Provinsi hingga Kab/Kota, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1

Struktur Penerapan dan Pengelolaan dana Hibah



Didalam struktural diatas terdapat lembaga-lembaga yang saling berkaitan dalam penerapan dana hibah dan memiliki peran masing-masing yang sesuai dengan bidang pelaksanaannya.

Komite Pemerintah

Atas nama Pemerintah, Komite Pemerintah dibentuk melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya untuk mengelola kegiatan. Komite Pemerintah terdiri atas Tim Pengarah yang beranggotakan unsur eselon 1 dan 2 dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, serta *Team for Counterparts of Planning for IndII Stage 2* yang beranggotakan unsur eselon 3 dan 4 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi terkait pelaksanaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi.

1. Tim Pengarah bertugas untuk memberikan arahan mengenai kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan program hibah secara keseluruhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Pengarah dibantu sepenuhnya oleh *Team for Counterparts of Planning for IndII Stage 2* (Tim Teknis).
2. *Team for Counterparts of Planning for IndII Stage 2* bertugas untuk melakukan sosialisasi rencana program hibah kepada provinsi dan/atau kab/kota, Menyusun Dokumen Pedoman Pelaksanaan Program termasuk kriteria Pemerintah Daerah dan kriteria penilaian, Melakukan penilaian Pemda yang memenuhi kriteria program hibah, Memberikan pembinaan teknis kepada Pemda penerima hibah terhadap hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan di provinsi/kab/kota, Memberikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai progress pelaksanaan program hibah. Program Hibah akan dilaksanakan oleh provinsi/kabupaten/kota dengan berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Program Hibah. Organisasi pengelola program ini terdiri dari CPMU (*Central Project Management Unit*) di tingkat pusat, PPMU (*Provincial Project Management Unit*) di tingkat provinsi dan PIU (*Project Implementation Unit*) ditingkat kabupaten/kota.

Central Project Management Unit (CPMU)

Central Project Management Unit (CPMU) ditetapkan berdasarkan SK Direktur Jenderal Cipta Karya. Tugas ketua CPMU adalah sebagai berikut: Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan proyek lintas instansi dan tingkat pusat dan kabupaten/kota pada pelaksanaan Program Hibah, Berkoordinasi dengan wakil ketua CPMU untuk pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program, Menyampaikan laporan triwulan tingkat kemajuan pelaksanaan Program untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dan instansi pusat terkait, Memberikan rekomendasi kelayakan pencairan dana hibah masing-masing kabupaten/kota kepada Kementerian Keuangan berdasarkan hasil verifikasi yang dilaporkan oleh Wakil Ketua CPMU, Melaksanakan kegiatan verifikasi, monitoring dan evaluasi tahunan, Melakukan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program di provinsi dan kab/kota bersama dengan wakil ketua CPMU, PPMU dan PIU, Dalam melaksanakan tugasnya Ketua CPMU akan dibantu oleh wakil ketua CPMU masing-masing bidang dan Tim Konsultan independen yang akan bekerjasama dengan PPMU untuk pelaksanaan baseline survey dan verifikasi. Tugas dari Wakil Ketua CPMU adalah sebagai berikut: Membantu ketua CPMU dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pada masing-masing bidang,

Menyampaikan rencana kegiatan tahunan masing-masing kab./kota kepada Ketua CPMU, Membantu ketua CPMU dalam berkoordinasi dengan PPMU untuk melakukan monitoring pengelolaan program di masing-masing kab./kota sesuai dengan bidangnya masing-masing, Membantu ketua CPMU dalam melakukan monitoring progress pelaksanaan fisik dan keuangan Program Hibah Bantuan Pemerintah Australia secara nasional di masing-masing bidang, Membantu ketua CPMU dalam menyusun laporan progress pelaksanaan Program Hibah Bantuan Pemerintah Australia untuk disampaikan kepada *Team for Counterparts of Planning for IndII Stage 2*, Membantu ketua CPMU dalam menyiapkan laporan verifikasi terhadap usulan pencairan dana hibah dari masing-masing kabupaten/kota.

Provincial Project Management Unit (PPMU)

PPMU ditetapkan berdasarkan SK Direktur Jenderal Cipta Karya dan bertugas untuk Berkoordinasi dengan PIU di masing-masing kab./kota dalam pengelolaan program termasuk penyusunan rencana kegiatan tahunan, penganggaran, kegiatan baseline, verifikasi dan fasilitasi audit, Melakukan monitoring progress pelaksanaan fisik dan keuangan Program Hibah di tingkat provinsi, Menyusun laporan progres pelaksanaan triwulan Program Hibah untuk disampaikan kepada wakil ketua CPMU, dan Melaksanakan verifikasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi kelayakan pembayaran hibah untuk dilaporkan kepada wakil ketua CPMU, PPMU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tim konsultan, Project Implementation Unit (PIU). *Project Implementation Unit (PIU)* adalah Pejabat yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah dan bertugas untuk membantu Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan Program Hibah ini antara lain : Mengirimkan rencana komprehensif dan rencana tahunan Program Hibah, Menyiapkan dan menyampaikan kepada PPMU surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah, Menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada PPMU, CPMU, dan Kementerian Keuangan. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana, Menyusun laporan akhir pelaksanaan program, Berkoordinasi dengan Pokja AMPL kabupaten/kota untuk menyampaikan progres pelaksanaan program hibah ke dalam *National Water Supply and Sanitation Information Services (NAWASIS)*

SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah)

SKPD merupakan institusi yang akan melaksanakan kegiatan Program di kab./kota, dengan tugas sebagai berikut: Menyusun rencana komprehensif 2012-2015 (sampai berakhirnya program hibah) dan rencana tahunan pelaksanaan kegiatan program hibah untuk disampaikan kepada PIU, Melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kriteria, Fasilitasi pelaksanaan verifikasi, Menyusun laporan progres fisik dan keuangan bulanan atas pelaksanaan Program, Setelah tahapan pekerjaan selesai dilaksanakan, menyampaikan laporan pekerjaan selesai tersebut kepada PIU untuk dilakukan verifikasi, Membuat laporan akhir penyelesaian Program Hibah.

Tim Konsultan

Tim konsultan dalam rangka mendukung program ini terdiri dari: Tim konsultan Assessment, Baseline Survey dan Verifikasi yang dibiayai oleh Donor : Konsultan Assessment bertugas membantu CPMU untuk analisa usulan program, pendampingan penyusunan dan review DED, Konsultan baseline bertugas melaksanakan baseline

surve, dan Konsultan verifikasi bertugas melaksanakan verifikasi pelaksanaan pembangunan dan menyampaikan hasil verifikasi kepada PPMU dan CPMU. Tim Konsultan manajemen dan *Technical advisor*. Konsultan ini bertugas untuk mendampingi CPMU dalam melaksanakan tugas- tugasnya.

Dalam implementasi Program *Office Water and Sanitation AusAid* baik itu oleh pihak *AusAid*, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, tentunya terdapat tantangan dan hambatan antara lain: keterlibatan masyarakat belum didukung penuh oleh pemerintah, kurangnya transparansi dalam alokasi bantuan, daya dukung lingkungan semakin terbebani oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, interpretasi UU No. 7 Tahun 2004 tidak mendorong pengembangan dan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air, kebijakan yang memihak kepada masyarakat miskin masih belum berkembang, PDAM tidak dikelola dengan prinsip kepengusahaan, keterbatasan pembiayaan mengakibatkan rendahnya investasi, kelembagaan pengelolaan air yang sudah ada tidak memadai lagi dengan perkembangan saat ini, kemitraan dalam penyediaan air bersih kurang berkembang serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang kelestarian air.

Tata cara pelaksanaan Program Hibah mulai dari mekanisme hibah, pengusulan calon penerima hibah, pelaksanaan program, permintaan pencairan dana hibah, pencairan dana hibah hingga kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan untuk pencairan dana hibah akan disebutkan sebagai berikut: Mekanisme Hibah, Mekanisme Pengusulan Calon Penerima Hibah, Mekanisme Pelaksanaan, Mekanisme Permintaan Pencairan Dana Hibah, Mekanisme Pencairan Dana Program Hibah dan Kelengkapan Dokumen yang Harus Dilampirkan. Dengan mengikuti Program Hibah ini Pemerintah Daerah penerima hibah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah, persampahan dan pembangunan Infrastruktur Sanitasi yang aman bagi lingkungan.

Hasil yang dicapai Pemerintah Daerah dengan adanya Program *Office Water and Sanitation Australian Aid* dapat dikatakan berhasil dan diklaim oleh pemerintah daerah meminimalisir sebanyak 70-80% masyarakat yang kekurangan dan kesulitan mendapatkan air bersih, tidak terlepas juga dengan kualitas air bersih yang disalurkan sudah melalui standar yang ditetapkan oleh PDAM Tirta Manggar. Pendstribusi air dari waduk Sungai wain yang awalnya mengalami kesulitan karena masih terbatasnya infrastruktur jaringan-jaringan pipa ke rumah-rumah masyarakat sekitar sudah mulai mendapatkan distribusi air bersih dengan lancar karena adanya pembangunan infrastruktur induk pipa yang sudah tersambung ke jaringan pipa-pipa.

Kesimpulan

Kualitas dan Kapasitas air Waduk Wain sebagai penyedia air baku untuk kebutuhan air bersih di kota Balikpapan bagian utara semakin hari semakin menurun yang diakibatkan adanya perubahan tata guna lahan yang kurang memperhatikan kaidah lingkungan, sempadan sungai yang rawan longsor dan erosi, fluktuasi debit sungai yang besar dimana pada musim kemarau kering sedangkan pada musim hujan terjadi banjir, penyempitan badan sungai akibat pembangunan pemukiman liar, pencemaran limbah domestik, serta pendangkalan oleh sadimen dan sampah. Metode penyaluran dan pengelolaan air bersih yang sudah ada belum optimal untuk memenuhi kebutuhan

air bersih di Kota Balikpapan sehingga diperlukan pengembangan disektor tersebut seperti pembangunan jaringan-jaringan pipa agar masyarakat dapat merasakan air bersih, Hal itu kemudian mendorong Australia sebagai Negara yang memiliki program untuk mengembangkan sistem pengelolaan air bersih terpadu. Peran AusAid dalam pendistribusian air bersih antara lain sebagai inisiator dan fasilitator bagi penerapan metode Pengolahan Air berbasis pada Model infrastruktur yang modern. Penerapan Program *Office Water and Sanitation Australian Aid* dikota Balikpapan juga melibatkan Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi (ITK dan UNIBA), serta masyarakat. selain sebagai inisiator dan fasilitator, *AusAid* juga menyalurkan bantuan dana berupa hibah dari Kemitraan Australia. Pada tahun 2014 Indonesia khususnya kota Balikpapan mengimplementasikan Program *Office Water and Sanitation AusAid* bekerjasama dengan ITK (Institut Teknologi Kalimantan), UNIBA (Universitas Balikpapan) dan Pemerintah Kota Balikpapan melalui dana hibah yang diberikan oleh Australia untuk menyelesaikan permasalahan krisis air bersih dengan membangun infrastruktur dibidang sanitasi.

Dalam implementasi Program *Office Water and Sanitation AusAid* baik itu oleh pihak *AusAid*, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, tentunya terdapat tantangan dan hambatan antara lain: keterlibatan masyarakat belum didukung penuh oleh pemerintah, kurangnya transparansi dalam alokasi bantuan, daya dukung lingkungan semakin terbebani oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, interpretasi UU No. 7 Tahun 2004 tidak mendorong pengembangan dan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air, kebijakan yang memihak kepada masyarakat miskin masih belum berkembang, PDAM tidak dikelola dengan prinsip kepengusahaan, keterbatasan pembiayaan mengakibatkan rendahnya investasi, kelembagaan pengelolaan air yang sudah ada tidak memadai lagi dengan perkembangan saat ini, kemitraan dalam penyediaan air bersih kurang berkembang serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang kelestarian air.

Dengan adanya dana hibah dari *Australian Aid* ini Pemerintah Daerah mendapat tantangan yang harus bisa diselesaikan secara efisien, baik dari segi waktu penyelesaian dan dapat membangun sebuah fasilitas dibidang sanitasi yang berperan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekitar yakni pendistribusian air bersih secara merata tanpa mengurani kualitas dan kuantitas dari air tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Biro Perencanaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, *Peluang dan Prosedur Pemanfaatan Bantuan Luar Negeri*. 1999, hal 4

Holsti, K.J, *International Politics : Framework of Analysis*, New Jersey. 1995, hal. 180-181.

Kementrian Pekerjaan Umum DirJen Cipta Karya, *Pedoman Pengelolaan Prgram Hibah Australia – Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi*, Hal. 10

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, Pasal 10.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999

E-book

Allan, Tony. *Global Trade: Balancing Existing and Future Regional Water Resource Deficits* dalam Hans Gunter Brauch, *Facing Global Environmental Change: Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water security Concepts*. <http://en.bookfi.org>. Diakses pada 1 November 2017.

Rindra Hosanova, *Mengatasi Krisis Air Bersih di Kota Balikpapan Dengan Desalinasi Air yang Memanfaatkan Energi Terbarukan*, Institut Teknologi Kalimantan Balikpapan, 2017

Internet

UN-Water. *Water Security*. <http://www.unwater.org/topics/water-security/en/>. 2013. Diakses pada 30 Oktober 2014.

Anonim, *Australian Aid for Better Future* <http://australianaid-changetheworld.com/water/content/122334-resist-the-sickness> diakses pada 11 Oktober 2017 23:25 WITA

Anonim, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air: *Data Daerah Aliran Sungai*, <http://sda.pu.go.id:10001/sda-data>. Diakses pada 14 Juni 2015

Anonim, *Pemkot dapat Hibah Australia*, <http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/229268-pemkot-dapat-hibah-australia.html>. Diakses pada 12 Juni 2015

Anonim, *Overview of Australia's assistance for water, sanitation and hygiene* <http://dfat.gov.au/aid/topics/investment-priorities/education-health/water-sanitation-hygiene/Pages/water-sanitation-and-hygiene.aspx> diakses pada 17 Oktober 2017 18:32 WITA

Anonim, *Official Development Assistance Definition and Coverage* <http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm> Diakses pada 19 Oktober 2017 15:30 WITA

Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, *Kependudukan & Industri*, <https://balikpapankota.bps.go.id/Subjek/view/id/12#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1> diakses pada 21 Agustus 2017 16:45 Wita

Bagaskoro, *Bantuan Australia di Aceh buktikan Hubungan RI – Australia sngat erat* <http://kompas.com/politik//konten/23145-Bantuan-Australia-kepada-Indonesia> diakses pada 19 Oktober 2017 15:45 WITA

Hendry, *Kusuma, Permasalahan Umum di Balikpapan Utara* <http://balikpapanutara.balikpapan.go.id/content/27/krisis-air> diakses pada 14 Desember 2016

- INDLL, *Sanitation Public Diplomacy in Balikpapan*, 25-26 Mei 2015
<http://www.indii.co.id/index.php/en/events/sanitation-public-diplomacy-in-balikpapan-25-26-may-2015#power-point> diakses pada 22 Oktober 2017
- Kedutaan Besar Australia, *Kemitraan Pembangunan dengan Indonesia*
<http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/cooperation.html> diakses pada 19 September 2017 20:30 WITA
- Masykur, Rudi R, *Mencari Solusi Problem Air Baku di Balikpapan*,
<http://balikpapanpos.co.id/berita/detail/140853-mencari-solusi-problem-air-baku-di-balikpapan.html>. Diakses pada 9 Juni 2015
- McMullan, Bob, *Water and sanitation in Australia's aid program: building it back better*, <http://devpolicy.org/water-sanitation-australias-aid-program-building-back-better-20170215/> diakses pada 17 Januari 2017 13:00 Wita
- SMEC, *Hibah air minum dan sanitasi dan pengarusutamaan hibah kerja*
<http://www.indii.co.id/index.php/id/program-indo/air-dan-sanitasi?show=hibah-air-minum-dan-sanitasi-dan-pengarusutamaan-hibah-kinerja> diakses pada 13 November 2017 14:00 WITA
- Urban Low Emission Development Strategies, *Main Factor in Balikpapan*,
<http://urbanleds.iclei.org/index.php?id=187> diakses pada tanggal 25 Agustus 2016 14:00 Wita